

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI TERHADAP KOHABITASI DALAM  
PASAL 412 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023  
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKAITKAN  
DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

*Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

**IKHSAN MAULANA**

**2010113068**

**PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA**



**Pembimbing I : Yunita Syofyan, S.H., M.H.**


**Pembimbing II : Dr. Edita Elda, S.H., M.H.**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ANDALAS**

**PADANG**

**2024**

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: <b>Ikhsan Maulana</b>	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman /30 Juli 2002 b) Nama Orang Tua : Marwin dan Yosi Dewi N. c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Tata Negara e) No Bp : 2010113068	f) Tanggal Lulus : 5 November 2024 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) Lama Studi : 4 Tahun 3 Bulan i) IPK : 3,62 j) Alamat : Kaluat, Kota Pariaman	

**PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI TERHADAP KOHABITASI DALAM PASAL 412 AYAT (1) UNDANG UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA (Ikhsan Maulana,2010113068, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Tata Negara, 116 halaman, 2024, Pembimbing: Yunita Syofyan, S.H., M.H.dan Dr. Edita Elda, S.H., M.H.)**

**ABSTRAK**

Pasal 412 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang Perzinaan dan Kohabitasi yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih yang tinggal serumah bukan suami istri. Ini terdapat permasalahan apabila dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah; Pertama, apa latar belakang diaturnya kohabitasi dalam Pasal 412 ayat(1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana; Kedua, bagaimanakah perlindungan diri pribadi dalam tindak pidana kohabitasi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Normatif menggunakan data sekunder dan pendekatan penelitian yang digunakan ada 3 jenis pendekatan penelitian yaitu; 1) pendekatan perundang-undangan; 2) pendekatan historis; 3) pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan; Pertama, latar belakang diaturnya kohabitasi dalam pasal ini adalah bertujuan untuk memperluas definisi zina, yang sebelumnya terbatas dalam KUHP lama, menjadi hubungan seksual di luar pernikahan, baik antara individu yang terikat perkawinan maupun tidak. Pengaturan ini mencerminkan norma masyarakat yang religius dan komunal serta bertujuan untuk menjaga nilai-nilai kesusilaan dan martabat perkawinan.; Kedua, perlindungan diri pribadi dalam tindak pidana kohabitasi dikaitkan dengan Hak Asasi Manusia merupakan hak atas martabat, kebebasan, dan privasi. Meskipun tidak dibahas secara khusus dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), kohabitasi diakui dalam kerangka HAM, tetapi penerimaan sosial sering terhalang oleh norma budaya dan agama. Negara memiliki kewajiban melindungi hak-hak individu, sementara organisasi masyarakat sipil berperan dalam advokasi dan perlindungan, meskipun tantangan dalam implementasi dan perubahan norma sosial tetap ada. Seharusnya pengaturan mengenai kohabitasi harus jelas untuk melindungi institusi pernikahan dan keutuhan keluarga, serta mencegah dampak negatif seperti ketidakpastian status hukum anak. Namun, pengaturan ini harus memperhatikan Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas privasi dan kebebasan pribadi, dengan memastikan bahwa intervensi negara dilakukan dengan alasan yang sah dan proporsional.

**Kata Kunci : Perlindungan Diri Pribadi; Kohabitasi; KUHP Nasional; Hak Asasi Nasional**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 5 November 2024.  
Penguji:

Tanda Tangan	Penguji	Penguji
Nama Terang	<b>Beni Kharisma Arrasuli, SH,LLM</b>	<b>Sucy Delyarahmi, SH.,MH</b>


Mengetahui,  
Ketua Departemen Hukum Pidana : **Arfiani, SH.,MH**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

	Staf Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:



	No. University Alumni	Name: <b>Ikhsan Maulana</b>	No. Faculty Alumni
	a) Place/Date of Birth : Pariaman /30 July 2002	f) Graduation date : 5 November 2024	b) Parent's Name : Marwin.
c) Faculty : Law	h) Study Duration : 4 Years 3 Month	d) Concentration Program : Constitutional Law	i) GPA : 3,62
e) No Bp : 2010113068	j) Address : Kaluat, Kota Pariaman		

**PERSONAL PROTECTION AGAINST COHABITATION IN ARTICLE 412 PARAGRAPH (1) LAW NUMBER 1 OF 2023 CONCERNING THE BOOK OF CRIMINAL LAWS LINKED TO HUMAN RIGHTS**

**(Ikhsan Maulana,2010113068, Concentration Program Constitutional Law, Supervisor: Yunita Syofyan, S.H., M.H.dan Dr. Edita Elda, S.H., M.H. Faculty Of Hukum Andalas University, 116 Pages, 2024)**

**ABSTRACK**

Article 412 paragraph (1) of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code regulates adultery and cohabitation committed by two (2) or more people who live together who are not husband and wife. There are current issues related to Human Rights. Based on this, the problems in this study are as follows: First, what is the background of cohabitation regulation in Article 412 paragraph (1) of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code; Second, how personal protection in the crime of coexistence is related to Human Rights. The method used in the research is Normative Juridical using secondary data, and the research approach used is three types of research approaches, namely; 1) legislative approach; 2) historical approach; 3) comparative approach. The results of the study showed; First, the background of the arrangement of cohabitation in this article aims to expand the definition of adultery that was previously limited in the old Criminal Code, to include sexual relations outside of marriage, whether between married individuals or not. This regulation reflects the norms of religious and communal societies and aims to uphold the values of morality and dignity of marriage. Second, the protection of personal rights in the crime of coexistence is related to Human Rights, which includes the rights to dignity, freedom, and privacy. Although not specifically addressed in the Universal Declaration of Human Rights (UDHR), cohabitation is recognized within the framework of human rights, but social acceptance is often hindered by cultural and religious norms. The state has an obligation to protect individual rights, while civil society organizations play a role in advocacy and protection, although challenges in the implementation and change of social norms remain. Regulations regarding cohabitation must be clear to protect the institution of marriage and the integrity of the family, as well as to prevent negative impacts such as uncertainty about the legal status of children. However, these regulations must take into account Human Rights, especially the right to privacy and personal freedoms, ensuring that state interventions are carried out for legitimate and proportionate reasons.

**Keywords: Personal Self-Defense; Cohabitation; National Criminal Code; National Human Rights**

This thesis has been defended in front of the Examining Team and was declared passed on November 05 2024  
Examiner,

Signature	Examiner I	Examiner II
Bright Name	<b>Beni Kharisma Arrasuli, SH,LLM</b>	<b>Sucy Delyarahmi, SH.,MH</b>

Know,

Chair of the Civil Law Departement: **Arfiani, SH.,MH**

\_\_\_\_\_  
Signature

Alumni have registered with the Faculty/University and received an alumni number:

		Staf Fakultas/Universitas	
No. Faculty Alumni	Name:	Signature :	
No. University Alumni	Name:	Signature :	

